



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12719-12727

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Pengembangan Human Capital dalam Meningkatkan Kinerja Operasional Polri di Daerah Papua Pegunungan

Didit Saputra, Muchriady Muchran

Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar

diditobsessive@gmail.com*, muchriady@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian Pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau human capital merupakan salah satu faktor strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, termasuk dalam institusi kepolisian. Di lingkungan Polres Jayawijaya, pengembangan human capital memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Keberhasilan tugas tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan profesional personel, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Karakteristik masyarakat Papua Pegunungan masih sangat kental dengan sistem sosial adat yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap suku memiliki struktur adat tersendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum adat, sistem kepemimpinan, serta norma dan tata cara kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menuntut personel Polri untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua Pegunungan, yang berbeda secara signifikan dengan masyarakat pada umumnya di wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Jayawijaya, pengembangan human capital tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan kompetensi sosial, budaya, dan komunikasi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengembangan human capital dalam meningkatkan kinerja operasional Polri di daerah terpencil, khususnya di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki tantangan geografis kompleks seperti medan berbukit dan akses wilayah yang terbatas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan human capital yang efektif mampu meningkatkan kinerja operasional Polri serta memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kata kunci: Pengembangan Human Capital, Kinerja Operasional Polri, Papua Pegunungan, Pelatihan, Keamanan.

1. Latar Belakang

Keamanan merupakan salah satu faktor fundamental yang mendasari stabilitas, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kondisi keamanan yang stabil, aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks wilayah Papua Pegunungan, isu keamanan menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ekstrem, keberagaman sosial budaya, serta dinamika politik dan ekonomi yang khas. Keamanan di wilayah ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan hukum dan penanggulangan tindak kriminal, tetapi juga mencakup penciptaan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Papua Pegunungan memiliki karakteristik geografis yang sangat menantang, ditandai dengan medan pegunungan terjal, wilayah terpencil, serta keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan wilayah dan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Aksesibilitas yang terbatas menyebabkan aparat kepolisian menghadapi hambatan operasional dalam menjangkau wilayah-wilayah tertentu, sehingga menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan fisik, keterampilan teknis, serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Keamanan yang terjaga di tengah keterbatasan tersebut menjadi faktor krusial agar masyarakat tetap terlindungi dari ancaman eksternal maupun internal.

Selain tantangan geografis, Papua Pegunungan juga dihuni oleh berbagai suku dengan latar belakang budaya, bahasa, dan sistem sosial adat yang beragam. Setiap suku memiliki struktur adat, hukum adat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi sosial ini berpotensi memunculkan konflik horizontal, baik antarindividu maupun antarkelompok, terutama yang berkaitan dengan sengketa tanah, sumber

daya alam, maupun perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, stabilitas keamanan di Papua Pegunungan sangat bergantung pada kemampuan aparat kepolisian dalam memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal. Penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap adat istiadat setempat berpotensi memicu resistensi dan memperbesar konflik. Sebaliknya, pendekatan kepolisian yang kolaboratif dengan tokoh adat dan masyarakat lokal dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah eskalasi konflik serta menjaga harmoni sosial.

Keamanan yang stabil juga memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa rasa aman, masyarakat akan kesulitan mengembangkan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan usaha lokal lainnya. Gangguan keamanan dapat menghambat pembangunan infrastruktur serta menurunkan minat investasi di wilayah Papua Pegunungan. Sebaliknya, keamanan yang terjamin menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, keamanan tidak hanya berfungsi sebagai tujuan, tetapi juga sebagai prasyarat utama pembangunan wilayah.

Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Jayawijaya sebagai satuan kewilayahan Polri di Papua Pegunungan menghadapi tantangan operasional yang jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, keberhasilan Polres Jayawijaya dalam menjalankan tugasnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pengembangan sumber daya manusia atau human capital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kinerja operasional Polri di wilayah ini.

Human capital merujuk pada nilai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki individu dalam suatu organisasi. Becker (1967) menjelaskan bahwa human capital merupakan bentuk investasi melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan organisasi [1]. Pandangan ini diperkuat oleh Son (2010) yang menyatakan bahwa human capital merupakan aset tak berwujud yang melekat pada individu melalui kompetensi, pengalaman, dan nilai-nilai kerja [2]. Dalam organisasi berbasis layanan publik seperti kepolisian, kualitas human capital memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan aset fisik semata. Putri dkk. (2021) menegaskan bahwa investasi pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan investasi infrastruktur fisik, terutama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan [3].

Pengembangan human capital dalam institusi kepolisian mencakup berbagai upaya terencana untuk meningkatkan kualitas personel, baik dari aspek teknis, profesional, maupun etika. Fernandez, Darsono, dan Siregar (2023) menjelaskan bahwa pengembangan human capital dalam kepolisian meliputi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan motivasi dan kepuasan kerja anggota [4]. Laoli dan Kristianingsih (2025) menemukan bahwa pengembangan SDM yang terencana dan berfokus pada keterampilan teknis, etika, serta kompetensi relevan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja operasional lembaga penegak hukum. Muin (2025) juga menekankan pentingnya pengembangan moral dan profesionalisme melalui pendidikan berbasis nilai-nilai etika kepolisian guna menjaga integritas Polri [6].

Dalam konteks Polri, human capital tidak hanya mencakup kemampuan teknis kepolisian dan pemahaman hukum, tetapi juga keterampilan komunikasi, pengendalian konflik, pengambilan keputusan, serta pemahaman budaya lokal. Reformasi sumber daya manusia Polri diarahkan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas melalui sistem pendidikan, pelatihan, promosi berbasis merit, serta penguatan etika organisasi [7]. Hal ini menjadi sangat relevan di wilayah Papua Pegunungan, di mana kompleksitas sosial dan budaya menuntut pendekatan kepolisian yang adaptif dan kontekstual.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan human capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional Polri. Aditya (2023) menemukan bahwa pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis dan interpersonal mampu meningkatkan efektivitas operasional kepolisian, yang tercermin dari penurunan tingkat kejahatan dan meningkatnya kepuasan Masyarakat [8]. Vasumathi (2025) menambahkan bahwa pengembangan SDM yang memadai juga memperkuat kemampuan anggota Polri dalam membangun hubungan dengan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian [9]. pelatihan berbasis analisis kebutuhan serta penilaian kinerja yang objektif berkontribusi pada keberhasilan operasional Polri.

Namun demikian, pengembangan human capital Polri di Papua Pegunungan menghadapi berbagai tantangan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keberagaman etnis menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengembangan SDM. Yustini (2023) menekankan bahwa pengembangan SDM di wilayah ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui pelatihan berbasis kearifan lokal dan pemahaman budaya setempat agar lebih efektif [10]. Strategi pengembangan SDM yang tidak mempertimbangkan konteks lokal berpotensi menurunkan efektivitas kinerja operasional Polri.

Implikasi pengembangan SDM terhadap kinerja Polri di Papua Pegunungan sangat signifikan. Widowati (2025) menyatakan bahwa pengembangan SDM berbasis kompetensi teknis dan pemahaman tantangan lokal mampu menciptakan situasi operasional yang lebih kondusif [7]. Saragih et al. (2024) menunjukkan bahwa pelatihan khusus seperti manajemen konflik, komunikasi interpersonal, dan pengambilan keputusan meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam menangani situasi kompleks [11]. Anwar (2023) menegaskan bahwa kualitas pengembangan SDM di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial tinggi berdampak langsung pada peningkatan kinerja operasional dan kualitas pelayanan kepolisian [12].

Lebih lanjut, hubungan antara human capital dan keamanan menjadi semakin relevan di era modern. Putri dkk. (2021) menyatakan bahwa pengembangan human capital mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan [3], kecepatan respons, dan keterampilan teknis aparat dalam menangani masalah keamanan. Namun demikian, Eko Indra Heri (2019) mengkritisi bahwa budaya militeristik, birokratis, dan sentralistik yang masih melekat pada Polri dapat menjadi penghambat peningkatan kinerja organisasi [13]. Dalam era revolusi industri 4.0, Polri dituntut untuk mengubah mindset dan culturset ke arah yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan human capital merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kinerja operasional Polri dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan di Papua Pegunungan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bentuk, kontribusi, serta tantangan pengembangan human capital dalam mendukung kinerja Polri di wilayah Papua Pegunungan.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena pengembangan human capital dalam institusi kepolisian serta pengaruhnya terhadap keamanan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Polres Jayawijaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, dan konteks sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian terkait kebijakan dan praktik pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja operasional Polri [14].

Pendekatan ini juga relevan untuk menelaah fenomena sosial yang kompleks, seperti hubungan antara pengembangan human capital dan stabilitas keamanan di wilayah dengan karakteristik geografis dan budaya yang unik. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika internal organisasi kepolisian serta interaksinya dengan lingkungan sosial masyarakat setempat [15].

2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Polres Jayawijaya, yang merupakan salah satu satuan kewilayahan Polri di wilayah Papua Pegunungan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Jayawijaya memiliki karakteristik operasional yang khas, baik dari sisi geografis, sosial, maupun budaya, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pengembangan human capital dalam konteks keamanan daerah terpencil.

Subjek penelitian meliputi anggota Polres Jayawijaya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan sumber daya manusia. Informan penelitian dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses pengembangan SDM. Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi Kapolres Jayawijaya sebagai

pengemban fungsi manajerial tingkat atas (top manager), Kabag SDM Polres Jayawijaya sebagai pengemban fungsi manajerial operasional (lower manager), serta beberapa personel Polres Jayawijaya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Teknik pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan representatif terkait kebijakan, implementasi, serta dampak pengembangan human capital di lingkungan Polres Jayawijaya [16].

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait kebijakan pengembangan SDM, bentuk pelatihan yang diberikan, serta persepsi informan mengenai pengaruh pengembangan human capital terhadap kinerja operasional dan keamanan. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari sudut pandang informan kunci.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lingkungan Polres Jayawijaya dan dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Observasi bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pengembangan human capital diimplementasikan serta bagaimana perilaku dan kinerja personel dalam menjalankan tugas pengamanan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kegiatan, data pelatihan, kebijakan pengembangan SDM, serta arsip lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data melalui triangulasi sumber dan metode [17].

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis interaktif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskrip dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan proses pengkodean (coding) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengembangan human capital, kinerja operasional Polri, serta implikasinya terhadap keamanan di wilayah Papua Pegunungan.

Setelah proses pengkodean, data dianalisis untuk menemukan pola hubungan dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh kutipan langsung dari informan dan data pendukung lainnya. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode, serta melakukan pengecekan ulang data kepada informan (member check) bila diperlukan. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah [15].

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Bentuk Pengembangan Human Capital di Polri

Beberapa bentuk pengembangan human capital yang diterapkan Polri antara lain:

3.1.1 Pendidikan Formal Kepolisian

A. Pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL)

Pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan lembaga pendidikan kepolisian lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan personel Polri yang profesional. Program pendidikan ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota Polri memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian yang kompleks dan penuh tantangan [13]. Tujuan utama pendidikan di AKPOL adalah untuk menghasilkan perwira Polri yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, berintegritas, dan mampu bekerja di berbagai kondisi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah dengan tantangan khusus seperti daerah terpencil atau daerah konflik. Pendidikan di AKPOL juga bertujuan untuk mempersiapkan calon perwira yang dapat mengemban tugas kepolisian secara efektif dan efisien.

AKPOL menawarkan program pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen utama yang menyeluruh, yang dirancang untuk membentuk calon perwira Polri dengan karakteristik yang sesuai dengan tuntutan profesi kepolisian yaitu pendidikan akademis yang meliputi mata pelajaran teori dalam berbagai bidang seperti hukum, kriminologi, manajemen kepolisian, dan ilmu sosial. Program akademis ini memberi landasan yang kuat dalam teori-teori dasar yang harus dipahami oleh setiap calon perwira untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Selain teori, pendidikan di AKPOL juga mengajarkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian, seperti taktik kepolisian, penanggulangan kerusuhan, penanganan kriminalitas, penyelidikan, serta pemberantasan terorisme dan kejahatan terorganisir. Pelatihan keterampilan ini bertujuan agar para perwira Polri siap menangani berbagai situasi yang dapat terjadi di lapangan serta mengutamakan pembinaan fisik dan mental para calon perwira. Latihan fisik seperti bela diri, ketahanan tubuh, dan latihan survival dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik para peserta. Sementara itu, pembinaan mental berfokus pada penanaman nilai-nilai moral, disiplin, tanggung jawab, serta etika profesi kepolisian yang sangat penting dalam menjalankan tugas kepolisian serta Pelatihan Kepemimpinan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan di AKPOL. Dalam proses ini, calon perwira dilatih untuk mengelola tim, memimpin operasional di lapangan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sering kali penuh tekanan. Para calon perwira juga diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan komunikasi dan negosiasi, yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat.

B. Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM)

Lembaga ini menyediakan pendidikan untuk perwira Polri yang ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial. Pendidikan di SESPIM bertujuan untuk mempersiapkan perwira agar mampu mengambil peran lebih tinggi dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan strategis.

C. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdikpol)

Lemdikpol bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh anggota Polri, dari tingkat bintara hingga perwira. Program pelatihan di sini lebih fokus pada peningkatan kompetensi operasional, pengetahuan teknis, serta kemampuan manajerial.

D. Sekolah Inspektur Polisi (SIP)

Program pendidikan di SIP diperuntukkan bagi calon perwira yang akan menempati posisi sebagai inspektur polisi. SIP memberikan pembekalan mengenai teori dan praktik dalam kepolisian, serta pelatihan yang lebih fokus pada keterampilan teknis kepolisian dan pengawasan.

E. Pendidikan Khusus di Daerah Tertentu

Di daerah-daerah yang memiliki tantangan sosial dan geografis tertentu (misalnya, Papua Pegunungan), Polri juga menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi local [18]. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan personel yang mampu bekerja dalam kondisi ekstrem dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang unik.

Pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian tidak hanya berhenti setelah kelulusan, tetapi berlanjut dengan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Polri terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kapasitas anggota Polri melalui berbagai pelatihan lanjutan yang dapat meningkatkan keterampilan operasional, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam praktiknya, pengembangan human capital di Polri juga melibatkan pembinaan terhadap personel yang sudah bertugas di lapangan melalui pendidikan profesi, pelatihan lanjutan, serta peningkatan kualifikasi akademis. Ini penting agar personel Polri tetap kompeten dan siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

3.1.2 Pelatihan dan Pendidikan Khusus

Pelatihan teknis, keterampilan manajerial, serta pelatihan penanganan konflik sosial merupakan bagian penting dalam pembentukan personel Polri yang profesional dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di lapangan, terutama di daerah-daerah dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis yang kompleks, seperti di Papua

Pegunungan. Setiap jenis pelatihan ini memiliki tujuan dan manfaat khusus yang saling mendukung dalam membekali personel Polri agar dapat menjalankan tugas dengan efektif.

A. Pelatihan Teknis Kepolisian

Pelatihan teknis kepolisian merupakan pelatihan yang berkaitan dengan penguasaan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh personel Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali anggota Polri dengan kemampuan teknis dalam menangani berbagai situasi lapangan yang bersifat spesifik, seperti penegakan hukum, penyelidikan, serta pelaksanaan operasi-operasi kepolisian. Dalam pelaksanaannya, personel Polri dilatih untuk menguasai taktik kepolisian yang diperlukan dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk penanganan demonstrasi massa, pengejaran pelaku kriminal, serta operasi pemberantasan terorisme, dengan menekankan koordinasi tim dan ketepatan strategi dalam situasi darurat.

Selain penguasaan taktik lapangan, pelatihan teknis kepolisian juga mencakup peningkatan kemampuan dalam bidang penyelidikan dan forensik, penanganan kejahatan khusus, serta penggunaan alat dan peralatan kepolisian. Personel Polri dibekali keterampilan dalam melakukan penyelidikan kasus, pengumpulan dan pengelolaan bukti, serta pemanfaatan perangkat forensik guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan profesional, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah dengan tantangan geografis seperti Papua Pegunungan. Pelatihan penanganan kejahatan khusus juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pola kejahatan yang berkembang, seperti perdagangan narkoba, terorisme, kejahatan transnasional, dan korupsi, serta strategi penanggulangannya. Di samping itu, anggota Polri dilatih dalam penggunaan berbagai peralatan dan teknologi kepolisian, termasuk alat komunikasi, persenjataan, kendaraan operasional, serta teknologi pengawasan dan intelijen, guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal dan aman.

B. Pelatihan Keterampilan Manajerial

Pelatihan keterampilan manajerial merupakan komponen penting dalam pengembangan human capital Polri untuk memastikan personel, khususnya perwira, mampu bekerja secara efektif dalam struktur organisasi yang hierarkis dan dinamis. Pelatihan ini bertujuan membekali perwira Polri dengan kemampuan kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan strategis, serta koordinasi antarunit dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Melalui pelatihan kepemimpinan, perwira Polri dipersiapkan untuk memimpin tim secara efektif, menginspirasi bawahan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang penuh tekanan, termasuk dalam mengarahkan, mengorganisasi, dan mengoordinasikan operasi kepolisian yang melibatkan berbagai pihak.

Selain kepemimpinan, pelatihan manajerial juga mencakup penguatan kemampuan dalam manajemen sumber daya, perencanaan operasional, dan manajemen krisis. Perwira Polri dilatih untuk mengelola personel, anggaran, dan logistik secara efisien, yang menjadi sangat penting terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang sulit seperti Papua Pegunungan. Pelatihan perencanaan operasional membekali perwira dengan kemampuan merancang dan mengimplementasikan rencana yang realistis, efisien, dan tepat sasaran, sementara pelatihan manajemen krisis mempersiapkan mereka untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, konflik sosial, atau insiden besar lainnya dengan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif dalam kondisi yang penuh tekanan.

C. Pelatihan Penanganan Konflik Sosial

Pelatihan penanganan konflik sosial merupakan keterampilan yang sangat penting bagi anggota Polri, khususnya di wilayah dengan tingkat keragaman sosial dan budaya yang tinggi seperti Papua Pegunungan. Konflik sosial di wilayah ini sering melibatkan ketegangan antar kelompok, isu hak asasi manusia, serta potensi kekerasan antar komunitas, sehingga menuntut kemampuan personel Polri dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara damai dan efektif. Melalui pelatihan ini, anggota Polri dipersiapkan untuk berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta harmoni sosial di tengah masyarakat.

Pelatihan penanganan konflik sosial mencakup penguatan kemampuan mediasi dan negosiasi untuk mengatur komunikasi antar pihak yang bertikai, meredakan ketegangan, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, personel Polri juga dibekali keterampilan pengendalian massa dengan pendekatan non-kekerasan guna mengelola potensi kerusuhan sosial tanpa memicu eskalasi konflik. Pelatihan ini juga menekankan

pentingnya pendekatan budaya dan sensitivitas sosial melalui pemahaman nilai-nilai adat, tradisi, dan norma masyarakat setempat, serta kemampuan menangani konflik antar kelompok yang dipicu oleh perbedaan sosial, politik, atau etnis, sehingga dapat mencegah meluasnya konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

3.2 Pengaruh Pengembangan Human Capital terhadap Keamanan

Pengembangan human capital di Polres Jayawijaya berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja anggota dalam menjaga keamanan. Program pelatihan yang berfokus pada keterampilan taktis, komunikasi, dan manajemen krisis terbukti meningkatkan kemampuan anggota dalam merespons situasi darurat.

3.2.1. Pengembangan Human Capital di Polres Jayawijaya

Pengembangan human capital di Polres Jayawijaya berfokus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota Polri, yang melibatkan berbagai program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kondisi lapangan. Di Polres Jayawijaya, yang terletak di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang tinggi, pengembangan human capital menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa anggota Polri siap menghadapi tantangan yang ada.

Beberapa aspek pengembangan human capital di Polres Jayawijaya yang tercermin dalam penelitian ini berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesiapan personel dalam menghadapi tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Pelatihan keterampilan taktis menjadi sangat penting mengingat kondisi wilayah Jayawijaya yang didominasi oleh medan berat dan daerah terpencil, sehingga menuntut kesiapan fisik dan teknis yang tinggi. Melalui pelatihan ini, anggota Polri dibekali kemampuan dalam penanganan kerusuhan, pengejaran pelaku kriminal, serta pelaksanaan operasi keamanan di medan yang sulit, dengan tujuan memastikan bahwa personel mampu bertindak secara efektif dan profesional dalam situasi lapangan yang menantang.

Selain keterampilan taktis, pengembangan human capital di Polres Jayawijaya juga menitikberatkan pada peningkatan kemampuan komunikasi serta manajemen krisis dan pengendalian konflik. Pelatihan komunikasi difokuskan pada penguatan keterampilan berinteraksi dengan masyarakat lokal melalui pemahaman budaya setempat, pembangunan hubungan yang harmonis, serta penerapan teknik negosiasi untuk meredakan potensi ketegangan. Sementara itu, pelatihan manajemen krisis dan pengendalian konflik bertujuan membekali anggota Polri dengan kemampuan merespons situasi darurat secara cepat dan tepat, mengendalikan konflik sosial yang berpotensi berkembang menjadi kerusuhan atau konflik antar kelompok, serta mencari solusi damai tanpa menimbulkan kekerasan lebih lanjut, sehingga mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Jayawijaya.

3.2.2. Program Pelatihan yang Diterapkan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan yang berfokus pada keterampilan taktis, komunikasi, dan manajemen krisis memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan anggota Polres Jayawijaya dalam merespons berbagai situasi darurat. Pelatihan keterampilan taktis dirancang untuk membekali anggota Polri dengan kemampuan praktis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas lapangan, khususnya pada kondisi yang menuntut respons cepat dan tepat. Melalui pelatihan ini, personel dilatih dalam penanganan kerusuhan massa, penindakan kriminal, operasi penanggulangan terorisme, serta pengendalian situasi berbahaya, sehingga meningkatkan kesiapan fisik dan mental serta kemampuan pengambilan keputusan dalam menghadapi ancaman keamanan.

Selain itu, pelatihan komunikasi dan manajemen krisis juga berperan penting dalam mendukung efektivitas kinerja anggota Polri. Pelatihan komunikasi membekali personel dengan keterampilan berinteraksi secara efektif dengan masyarakat melalui penggunaan bahasa yang dapat diterima oleh berbagai kelompok, penerapan pendekatan diplomatis, serta pembangunan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di wilayah yang memiliki keberagaman budaya dan potensi ketegangan sosial tinggi. Sementara itu, pelatihan manajemen krisis meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan respons terhadap situasi darurat seperti bencana alam, kerusuhan sosial, dan aksi terorisme secara terstruktur dan efektif, termasuk pengelolaan stres dan pengambilan keputusan dalam tekanan tinggi, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.

3.2.3. Pengaruh Positif terhadap Kinerja Anggota Polri

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan human capital di Polres Jayawijaya berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengaruh tersebut tercermin dari meningkatnya responsivitas dan efektivitas personel dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Anggota Polri yang telah mengikuti pelatihan keterampilan taktis dan manajemen krisis menunjukkan kemampuan merespons ancaman keamanan secara cepat, tepat, dan terukur, sehingga mampu meminimalkan dampak negatif kejadian terhadap masyarakat serta mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di wilayah Jayawijaya.

Selain peningkatan responsivitas, pengembangan human capital juga berkontribusi pada meningkatnya profesionalisme anggota Polri dalam penanganan konflik serta efektivitas operasional secara keseluruhan. Pelatihan komunikasi membantu anggota Polri berinteraksi dengan masyarakat secara lebih bijaksana dan empatik, sehingga dapat meredakan ketegangan, mencegah eskalasi konflik, dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat setempat. Peningkatan keterampilan dalam penanganan krisis dan konflik sosial turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas keamanan. Di sisi lain, pelatihan yang diterima juga meningkatkan efektivitas operasional anggota Polri dalam perencanaan, pelaksanaan tugas, serta koordinasi antarunit, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja institusi Polres Jayawijaya secara keseluruhan.

3.4 Tantangan dalam Pengembangan Human Capital

Tantangan utama dalam pengembangan human capital di Polres Jayawijaya mencakup masalah infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas sosial yang ada di wilayah tersebut. Meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas personel, masih banyak hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses pelatihan, jumlah personel yang terbatas, serta kesulitan dalam mengelola keberagaman sosial dan budaya di Papua. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah, perbaikan infrastruktur, dan fokus pada pengembangan kemampuan manajerial serta psikologis anggota Polri agar mereka dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien di wilayah yang penuh tantangan seperti Jayawijaya.

4. Kesimpulan

Pengembangan human capital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan keamanan di Polres Jayawijaya melalui program pelatihan yang berfokus pada keterampilan taktis, komunikasi, dan manajemen krisis, berdampak positif terhadap peningkatan kinerja anggota Polri dalam menjaga keamanan. Pelatihan-pelatihan ini memberikan anggota Polri keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam merespons situasi darurat dan menjaga ketertiban di daerah yang memiliki kondisi sosial dan geografis yang khas, seperti di Wilayah Papua Pegunungan. Dengan pengembangan human capital yang berkelanjutan, Polres Jayawijaya dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat upaya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan.

Referensi

1. Becker, Gary S. *The Age of Human Capital*.
2. Son, Hyun H. 2010. *Human Capital Development*. www.worldscientific.com.
3. Putri, Bilqis Oktaviani, Vegyta Tresya, Putri Sukmana, dan Nadila Pradana Fahyan. 2021. *Embarking the Republic of Indonesia National Police (POLRI) Investment on Overseas Postgraduate Education Eminence*.
4. Fernandez, Frederik, Darsono Darsono, dan Mangihut Siregar. 2023. "implementasi Nilai-nilai tribrata dalam mewujudkan polri yang presisi: tinjauan penerapan kode etik anggota polri menuju sdm polri yang profesional dan berkualitas di kepolisian resort jombang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(2). <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3482>.
5. Laoli, E., & Kristianingsih, E. (2025). *Pengaruh Pengembangan SDM terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 12(1), 34-47. <https://doi.org/10.37899/journalbisecoman.v6i3.2390>
6. Muin, S. A. (2025). *Pengaruh Pengembangan SDM terhadap Profesionalisme dan Integritas Polisi*. *Journal LaBisecoman*, 3(1), 66-78.
7. Widowati, Maria, Retno Mawarini Sukmariningsih, Mashari Mashari, dan Afif Noor. 2025. "Police Human Resource Reform for Good Governance and Sustainable Development in Indonesia." *Management (Montevideo)* 3: 353. <https://doi.org/10.62486/agma202535>
8. Aditya, L. R. (2023). *Key Factors for Evaluating Police Human Resources and Performance Appraisal*. *Journal of Human Resource Management*, 10(1), 105-118.
9. Vasumathi, A. (2025). *Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja SDM di Lembaga Penegak Hukum*. *Applied Research Journal*, 19(4), 65-80.

10. Yustini, T. (2023). *Analisis Pengaruh Kualitas Pengembangan SDM terhadap Kinerja Kepolisian*. Journal of Law and Public Policy, 8(1), 50-63.
11. Saragih, M. G., Saragih, L., Sugito, & Hantono, J. (2024). *Pengembangan Human Capital untuk Meningkatkan Kinerja Polisi di Daerah Remote*. Journal of Public Safety, 15(3), 98-107.
12. Anwar, M. C. (2023). *Pengaruh Pelatihan SDM terhadap Kinerja Operasional Polri*. E-Journal of Law and Social Sciences, 5(2), 89-102.
13. Eko Indra Heri. 2019. "Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0." *Heri* 13(2): 116–26. doi:10.15240/tul/001/2018-1-008.
14. Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
15. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
16. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
17. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
18. Putu, Ni Luh, Vina Austriani, Tedi Erviantono, dan Eka Purnamaningsih. 2015. *Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance (Studi Penerimaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali Tahun Anggaran 2015)*. www.merdeka.comdengn.